PENSTRA
(Rencana Strategis)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2023 - 2026

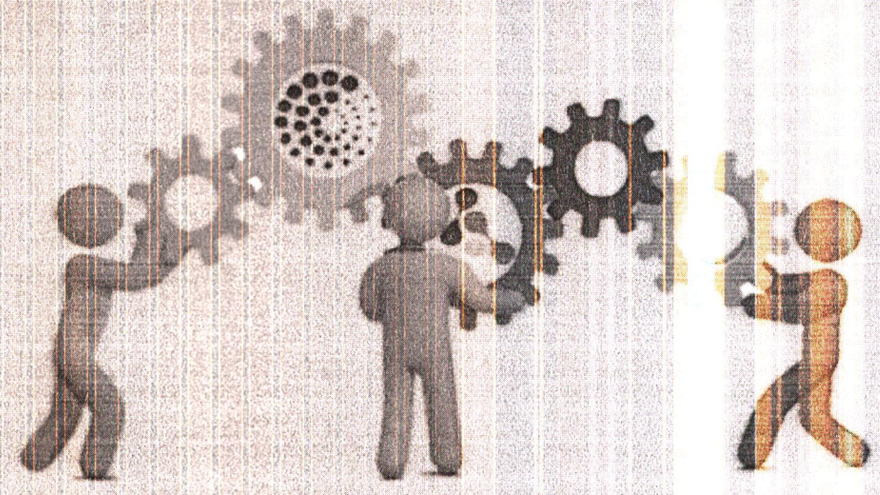

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan atau panduan untuk memudahkan mencapai tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Keterkaitan antara perencanaan di OPD dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat akan mempermudah pengembangan pembiayaan bersama untuk program-program yang akan dilakukan.

Sebagai sebuah dokumen yang utuh, Renstra tidak berdiri sendiri atau terpisah dari rencana pembangunan keseluruhan tingkat kabupaten. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan bagian integral dari rencana pembangunan kabupaten yang terkait dengan sektor –sektor lain. Dokumen ini menyajikan latar belakang tentang pentingnya dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), yang terdiri dari gambaran kondisi pendidikan, issue-issue strategis, arah dan kebijakan pendidikan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Atas jasa, bantuan, kerjasama, kritik, dan saran yang baik dari semua pihak dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terima kasih.

Liwa, 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lampung Barat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BULKI, S.Pd., M.M

NIP. 19690915 199408 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT 10

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD 10

2.2. Sumber Daya Dinas Pedidikan Kabupaten Lampung Barat 14

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 21

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGK DAERAH 22

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelay n OPD 22

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis 23

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 26

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 29

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDA AN 31

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 33

BAB VIII. PENUTUP 35

BAB I
PEN AHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang lanjutnya disingkat dengan RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai denga ugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM aerah dan bersifat indikatif. Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah ada h sebagai sistem perencanaan daerah agar program dan kegiatan pembangu an daerah menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, muda dipantau, serta dapat terukur pencapaian hasilnya. Proses penyusunan Re tra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini diawali dengan penyusunan Tim F stra OPD yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala b Bagian dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupate Lampung Barat. Renstra merupakan dokumen perenanaan untuk jangka wa u 5 (lima) tahun yang mengacu merupakan penjabaran dari RPD Kabupate Lampung Barat.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Nega Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bang Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut c antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pas 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menye nggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nas al untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mah Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ng diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta re vansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan se ai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untu itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, te rah, dan

berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap w ga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak emperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang milikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, ama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan ak membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skil* sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta asyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaiman ang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem endidikan Nasional.

Era otonomi daerah yang dimulai dengan terbitnya Und g-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Und g-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara emerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undan n lainnya mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan p erintahan daerah di Indonesia. Otonomi daerah telah memberikan kewena n kepada setiap daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah saat ini mempunyai kewenan untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan pembiayaan, p ncanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan sta ar, norma dan kebijakan pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik ar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta ag a. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilaku melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar s nber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Untuk itu penyiapan perencanaan pembangunan sangat diperluk untuk mengakomodasikan berbagai perubahan dan perkembangan y g terjadi khususnya di Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam mengantisipasi dan menyikapi perubahan paradigma pembangunan melalui semangat otonomi daerah sebagaimana d manatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan erah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem P encanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan abupaten Lampung Barat harus mempunyai arahan yang jelas, te rah, dan

berkesinambungan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal perencanaan pembangunan dengan tetap mengacu kepada ia Dasar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat hun 2023 – 2026, sehingga dapat terjadi sinkronisasi antar semua sektor pe angunan dalam suatu sistem yang sinergis dalam upaya melaksanakan nisi serta mewujudkan visi Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertua di dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lam ng Barat tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang aksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, ata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pe angunan Daerah dinyatakan bahwa setiap satuan kerja perangkat da ah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis satuan kerja perang t daerah (Renstra-OPD). Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lam ung Barat sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mumpunyai tugas an fungsi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang endidikan perlu menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai arahan ki ja untuk kurun waktu lima tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 022, agar semua program dan kegiatan pembangunan daerah menjad terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau, rta dapat terukur pencapaian hasilnya. Penyusunan Renstra-OPD ini sedap mungkin mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi sumber daya yang da secara efektif dan berkelanjutan untuk pembangunan, terutama di bidang endidikan dan Kebudayaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan Dan budayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 adalah sebagai berik

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan abupaten Lampung Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem endidikan Nasional ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangahun Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanugnan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangun Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 202[illegible] Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 20[illegible] Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, disusun untuk menjadi arah organisasi yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang harus dijalankan oleh aparatur pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, sekaligus berfungsi

sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai as rasi yang ada. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan .abupaten Lampung Barat dimaksudkan sebagai salah satu indikator didala : evaluasi kinerja aparatur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam me ksanakan tugas dan fungsi Pelaksanaan Pendidikan di Daerah Kabupate Lampung Barat.

1.3.2. Tujuan

Renstra ini bertujuan untuk :

a. Menjadi pedoman pembangunan bidang Pendidikan dan I budayaan sehingga dapat lebih efesien dan efektif serta mempertaja program pembangunan pendidikan berdasarkan berbagai permasalahan endidikan di Kabupaten Lampung Barat;
b. Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tuga an fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung B at dalam rentang waktu lima tahun;
c. Menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendi kan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (REN TRA-OPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan istematika penyajian sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perang t Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pe bangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, eterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L d Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daer .

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan merintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yan mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenanga Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam p nyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari p nyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perang t Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengu s secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Dae h dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capa n-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perang t Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJM periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang mas dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pe bentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, s ta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepal Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daera ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan ta laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya y g dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya nencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha y ng masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perang t Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daera periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ata indikator

kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lain ya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat aerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstr K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) c n Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), has telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang b m plikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan elayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. I gian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran ebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelaya an yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKA DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhiny

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayana Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perang at Daerah ditinjau dari:

a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
c. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangk Daerah provinsi/kabupaten/kota;
d. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
e. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strateg dan hasil penentuan isu -isu strategis tersebut. Dengan demikian, pad bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang aka ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

4.2. Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamp g Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pe angunan pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, be dudukan dibawah dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris D rah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pend kan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pen kan dan Kebudayaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umu dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan Keb ayaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang endidikan dan Kebudayaan.

Adapun perincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan abupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 52

(1) Dinas merupakan unsur Penunjang urusan pemerintaha dibidang pendidikan dan kebudayaan.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di wah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 53

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
b. perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
c. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
e. pelaksanaan administrasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
   1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
   1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
   2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
   1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
   2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Kebudayaan, membawahi:
   1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
   2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
   1. Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidik Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
   2. Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ya g berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub B gian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, l ruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di wah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada kretariat dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada dil vah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada mas g-masing Bidang dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada d awah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pac ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sel gai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dim sud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaks a Teknis Dinas Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung ja b Kepada Kepala Dinas.

(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan l budayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan b gian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudaya terdapat pada Gambar 2.1 dibawah ini :

GAMBAR 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI NO : 70 TAHUN 2021

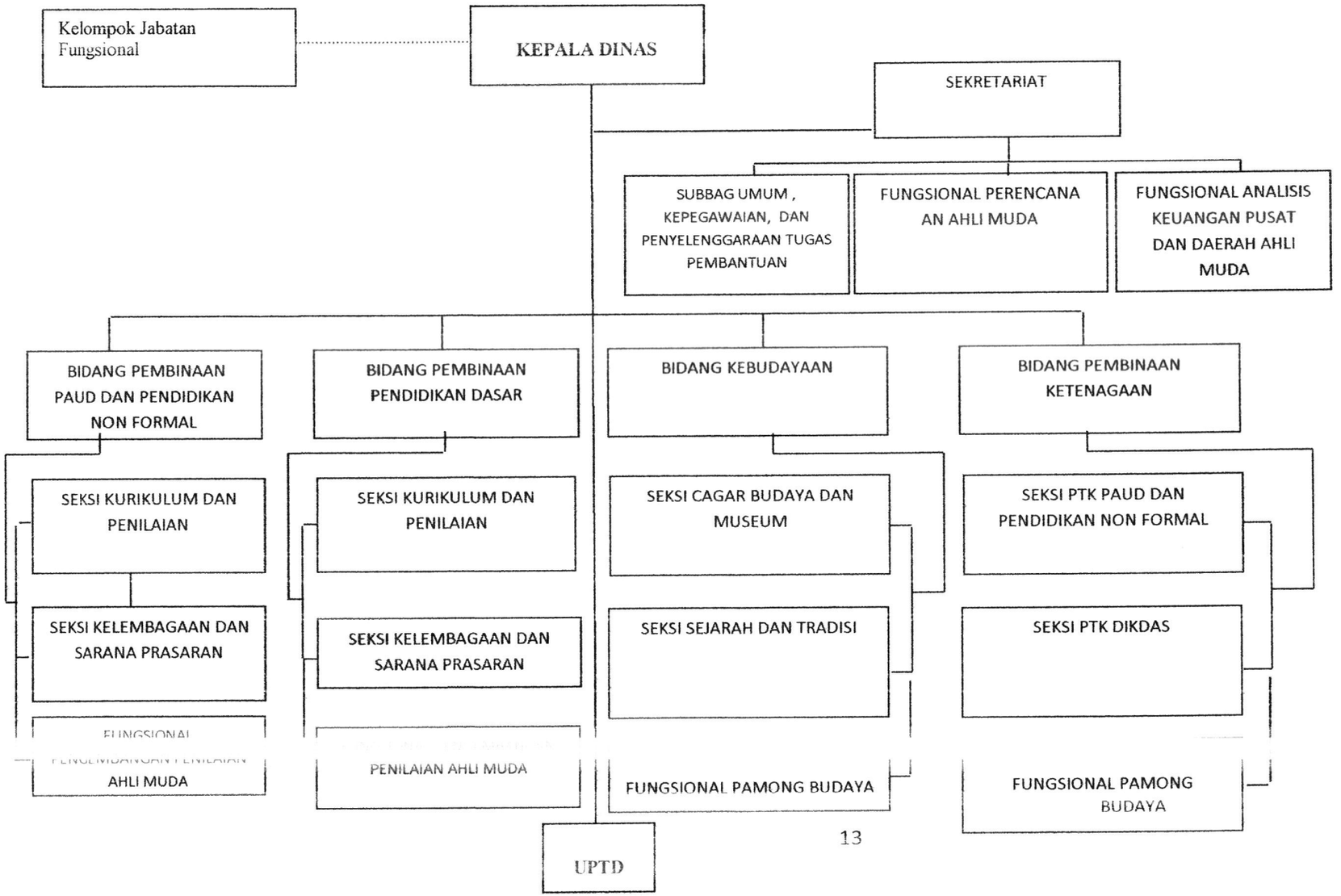

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Tingkat kompetensi dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sangat didukung oleh SDM yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Pada tahun 2022 jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1.926 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam) orang. Data selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022

Golongan/Ruang	Eselon						Non Eselon		Jumlah
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Tenaga Fungsional	Struktural	
Golongan IV/e									
Golongan IV/d									
Golongan IV/c							7		7
Golongan IV/b		1	1				324	2	328
Golongan IV/a				2			367	25	394
Jumlah Golongan IV									
Golongan III/d					1	5	413	7	426
Golongan III/c					1	5	251	7	264
Golongan III/b						2	179	4	185
Golongan III/a							203	6	209
Jumlah Golongan III									
Golongan II/d							19	2	21
Golongan II/c							12		12
Golongan II/b							53	6	59
Golongan II/a							19	1	20
Jumlah Golongan II									
Golongan I/d							1		1
Golongan I/c									
Golongan I/b									
Golongan I/a									
Jumlah Golongan I									0
Total		1	1	2	2	12	1848	60	1926

2.2.2. Asset/Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Dinas endidikan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun prasarana yang ada dalam lingkup Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana

No	NAMA	KONDISI	STATUS	JUMLAH	TAHUN	Keterangan
1	Laptop	BAIK	APBD	1	2019	KANTOR DINAS
2	Printer	BAIK	APBD	2	2019	KANTOR DINAS
3	PC KOMPUTER	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
4	PRINTER	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
5	LAPTOP	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
6	LAPTOP	BAIK	APBD	4	2020	KANTOR DINAS
7	PRINTER	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
8	GENSET	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
9	METERAN DIGITAL	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
10	Papan Baliho	BAIK	APBD	2	2018	KANTOR DINAS
11	Lemari Arsip Besi	BAIK	APBD	1	2019	KANTOR DINAS
12	TIAng Sound system	BAIK	APBD	2	2019	KANTOR DINAS
13	Almari	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
14	PROYEKTOR	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
15	MANEQUIN	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
16	TAPLAK MEJA	BAIK	APBD	10	2020	KANTOR DINAS
17	SPEAKER AKTIF	BAIK	APBD	2	2018	KANTOR DINAS
18	Sound System	BAIK	APBD	2	2019	KANTOR DINAS
19	Mic Warelees	BAIK	APBD	1	2019	KANTOR DINAS
20	KAMERA	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
21	Sarung Tapis	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
22	Bupak Tapis	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
23	Peci Tapis	BAIK	APBD	10	2020	KANTOR DINAS
24	Tepak Tapis	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
25	KOSTUM TARI KREASI	BAIK	APBD	21	2020	KANTOR DINAS
26	PAYUNG AGUNG	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
27	PENUTUP PAHAR	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
28	TEPAK SIRIH	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
29	Siger sai batin	BAIK	APBD	8	2020	KANTOR DINAS
30	PAKAIAN PENGANTIN SAI BATIN	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
31	TEPAK SIRIH	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
32	DUDUKAN PAYUNG AGUNG	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
33	KASUR CELUGAM	BAIK	APBD	7	2020	KANTOR DINAS
34	TUTUP PAYUNG	BAIK	APBD	4	2020	KANTOR DINAS
35	SARUNG BANTAL KEBAYAN	BAIK	APBD	6	2020	KANTOR DINAS
36	GAMELAN	BAIK	APBD	15	2020	KANTOR DINAS

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Strategis 2023-2026, diperluk . analisis kondisi pendidikan dikabupaten Lampung Barat tahun 2017-20 , sebagai referensi untuk mengetahui capaian kinerja dan permasalahan y g terjadi. Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka harapan lama sekolah				12,27	12,29	12,31	12,33	12,35	12,18	12,24	12,25	12,26	-
	Nilai rata Ujian Nasional (UN) SD				209,96	210,01	210,11	0	0	209,91	220,15	0	0	0
	Nilai rata Ujian Nasional (UN) SMP				235,91	236,01	236,11	0	0	235,81	213,89	0	0	0
	Angka Partisipasi Murni (APM)				100%	100%	100%	100%	100%			93,86	94,97	

	SD													
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP				91,82 %	91,87%	91,89%	91,94%	91,99 %			76,14	75,49	
	Angka melanjutkan sekolah				90,35 %	90,60%	90,75%	90,83%	90,85 %			91,24	100	
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional				6	8	9	10	11	2	2	9	9	
	Budaya yang													

	ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional													

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun 2018-2022					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	288.034 729.098	295.142.3 41.707	282.962.907.224	301.342.933.7 32,24	307.675.515.7 41	265.000.213.3 78	281.831.832.7 22	282.439.960.5 16	285.630.856.813	189.781.803.897, 334	92,00	95,49	99,82	94,79	61,68	2%	6%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P didikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstr abupaten untuk Propinsi dan Renstra Pendidikan Propinsi, Dinas Pen kan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mengimplimintasikan ta ngan dan peluang pengembangan Pendidikan pada kurun waktu em tahun mendatang yaitu :

2.4.1. Tantangan

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas da relevansi pendidikan, maka program pendidikan lebih berorientasi pada ebutuhan masyarakat. Oleh karena itu program pendidikan formal dan on formal mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pr sionalitas, produktivitas dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan pe ng usaha, yaitu dengan :

1. Komitmen Pemkab Lampung Barat dalam memajukan pendi an melaui ketersediaan 20% dari APBD
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan
4. Peningkatan pelestarian bahasa dan pengembangan s , budaya lampung barat.

2.4.2. Peluang

Dengan adanya tantangan Pendidikan dan untuk eningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan Kebudayaan, maka Dina endidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat harus dapat mempers kan :

1. SDM Pendidikan yang sesuai dengan arah pembangunan masa pan;
2. Seragam gratis bagi siswa;
3. Bantuan Siswa S1 Seni Budaya;
4. Meningkatkan mutu pendidikan;

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan dikabupaten Lampung Barat selama periode tahun 2018-2022 dari permasalahan diatas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2023-2026 mendatang sebagai berikut :

I. Bidang Pendidikan

1. Tahun 2021 Capaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD (usia 3-6 tahun) sebesar 19,37% masih dibawah capaian propinsi lampung sebesar 39,86% dan nasional sebesar 40.17%
2. Rata-rata kemampuan Litarasi berdasarkan asesmen nasional tahun 2021 :
   - SD mencapai nilai sebesar 1,64 masih dibawah angka nasional sebesar 1,70
   - SMP mencapai nilai sebesar 1,58 masih dibawah angka nasional sebesar 1,70.
3. Rata-rata kemampuan Numerasi berdasarkan asesmen nasional tahun 2021 :
   - SD mencapai nilai sebesar 1,49 masih dibawah angka nasional sebesar 1,60
   - SMP mencapai nilai sebesar 1,57 masih dibawah angka nasional sebesar 1,60.
4. Sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi standar nasional Pendidikan
5. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2021 mencapai angka 8.0[illegible], masih dibawah capaian propinsi lampung sebesar 8.08
6. Angka harapan lama sekolah tahun 2021 mencapai angka 12[illegible]6, masih dibawah capaian propinsi lampung sebesar 12,73
7. Tingkat kualifikasi Pendidikan (S1/D4) tenaga pendidik :
   - PAUD (TK) = 26,52%
   - SD = 81,20%
   - SMP= 99,79%
8. Proporsi capaian akreditasi satuan Pendidikan :

- PAUD (TK) = Akreditasi B = 16,10%, Akreditasi C = 21,84%
- SD = Akreditasi A=3,70% Akreditasi B=49,54% Akreditasi C=29, %
- SMP = Akreditasi A=10% Akreditasi B=38,33% Akreditasi C=28, %

II. Bidang Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat anta lain:

1. Warisan budaya tak benda daerah tersetifikasi sebesar 11,69%
2. Belum adanya objek diduga cagar budaya yang ditetapkan me di cagar budaya Daerah.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Urusan Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kabupaten Lampung Barat selama ta n 2018-2022 dapat digambarkan berdasarkan aspek pemerataan dan perlu an akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan penguatan t a kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Gambaran kondisi tersebut da t ditinjau dari berbagai data dan informasi tentang perkembangan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.

Seiring dengan tuntutan daya saing dalam penyediaan Su ber Daya Manusia yang berkualitas, maka program pemerintah beru Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang mewajibkan ana memiliki pendidikan dasar sampai sederajat SMP, nampaknya ha s mulai ditingkatkan sampai sederajat SMA. Tuntutan tersebut, untuk abupaten Lampung Barat sangat disadari dapat diwujudkan, mengingat lukungan dari berbagai komponen dalam penyelenggaraan pendidikan sampa 12 tahun, secara bertahap mulai meningkat daya dukungnya. Penyediaan komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan tesrebut, seperti telah rsedianya ruang kelas yang memadai dan sarana pendukung lain ya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya serap s wa yang ditandai dengan peningkatan APK pada tiga TP (Tahun Pelajaran terakhir.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidika Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Pendidikan ana usia dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kem ang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk mema ki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan

Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkat an mutu penyelenggaraan PAUD.

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan nak Usia Dini (PAUD) sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari Angka artisipasi Kasar (APK) PAUD Sebesar 19,37% masih dibawah capaian propin sebesar 39,86%.

2. Pendidikan Dasar

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidil n dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus me ngkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf ndidikan antar kelompok masyarakat. Angka Partisipasi Kasar SD dan Angka artisipasi Kasar SMP tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 mencapai 100% s lanjutnya untuk Angka Partisipasi Murni SD pada tahun 2019 mencapai 8 55% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 94,97%, sedang n Angka Pertisipasi Murni SMP pada tahun 2019 mencapai 76,39 % dan t un 2020 dengan capaian 75,49%, Angka Partisipasi murni tidak menc ai target diasumsikan adanya peserta didik jenjang SMP yang usianya kuran dari atau lebih dari usia SMP yaitu 13-15 tahun.

Dari kondisi pendidikan yang ada saat ini, secara umum beber a isu-isu strategis dan masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan pe lidikan di Kabupaten Lampung Barat mencakup beberapa aspek :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satu Tahun Pra Sek h Dasar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usi Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebuday n Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peny nggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sek ah Dasar Tahun 2019
2. Kebijakan kemendikbudristek tentang pelaksanaan asesme nasional dengan tujuan pengembangan kompetensi dan karakter n rid serta karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan
3. Peluncuran program guru dan sekolah penggerak dalam fran merdeka belajar kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi

4. Pemenuhan standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar penilaian berdasarkan PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Standar Sarana dan prasarana sekolah dan tersedianya Peraturan tentang pendirian sekolah
6. Penyelenggaraan layanan pendidikan kesetaraan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota

2. Urusan Kebudayaan

Dari kondisi perkembangan kebudayaan yang ada saat ini, secara umum beberapa isu-isu strategis dan masalah pokok yang dihadapi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat mencakup beberapa aspek :

1. Pemerintah daerah perlu memiliki regulasi tentang pelestarian pemajuan kebudayaan daerah berdasarkan uu no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan
2. Perlunya pemerintah daerah melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelestarian kebudayaan daerah berdasarkan uu no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan
3. Perlunya pemerintah daerah melakukan pendaftaran dan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten berdasarkan UU no 11 tahun 2010 tentang cagar budaya

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan OPD

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicap dimasa mendatang dan merupakan penjabaran misi dengan demikian tuj n dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah denga visi dan misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jar ka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program Sebelum menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode at analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarl n situasi dan kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamp g Barat. Berdasarkan sasaran RPD 2023-2026 maka ditetapkan tuju n Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebagai beril t :

1. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan
2. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan Cag r Budaya daerah

4.1.2. Sasaran OPD

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggamba an suatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program da kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efesien dan efektif, sa ran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan abupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

SASARAN I

Meningkatnya Layanan Pendidikan						
Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Angka Pertisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini/Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun x 100	%	100	100	100	100
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar/Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun x 100	%	100	100	100	100

SASARAN II

Meningkatnya Pengelolaan Warisan Budaya Daerah						
Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Jumlah WBTB Terverifikasi	Banyaknya WBTB yang terverifikasi	WBTB	3	5	7	9
Jumlah Cagar Budaya Daerah terverifikasi	Banyaknya Cagar Budaya Daerah yang terverifikasi	Objek	5	10	15	20

Pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat beserta indikator kinerjanya tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah (RPD)

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARA PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	20
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95	69,52	70,15	7
2	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudya, aman dan damai	Meningkatkan Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase Warisan Budaya Tak Benda Daerah tersertifikasi	13,30	15,50	17,70	20,0
			Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	2,40	6,40	10,40	14,4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH K BIJAKAN

Suatu strategi akan memperjelas pemikiran – pemikir secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentan berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar ncapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di Dinas ndidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan olel pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap ke atan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujua sasaran, misi dan visi.

Program yang ditetapkan merupakan kumpulan –kumpula kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sa aran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan budayaan Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih injut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran st egis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Keg tan juga merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendi kan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dengan memanfaatkan s nber daya yang ada secara optimal sesuai dengan kebijakan dan program ang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan pendidikan dan budayaan tahun 2023-2026 disusun untuk memberikan arah dan pe nan bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Lampung Barat. Strateg dan Arah Kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman orang tua siswa yang memiliki ar usia 3-4 tahun untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang layananar ober
2. Perluasan akses Layanan PAUD
3. Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
4. Meningkatkan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Me enangkan (PAKEM)

5. Meningkatkan peran dan fungsi, Kelompok Kerja Gu . (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Guru Tan n Kanak-Kanak (IGTK)
6. Penyesuaian linieritas tenaga pendidik sesuai latar belakang P didikan
7. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah/pemberian rekom idasi izin operasional sekolah dan pendirian sekolah baru
8. Perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan
9. Peningkatan dan perluasan layanan penyelenggaraan endidikan kesetaraan
10. Penyediaan beasiswa bagi masyarakat untuk melanjutkan k erguruan tinggi
11. penyediaan bantuan untuk lembaga adat/lembaga keseni /lembaga tradisi daerah dan rumah adat/tradisional
12. promosi dan muhibah budaya daerah
13. pemenuhan tim ahli cagar budaya kabupaten
14. penyediaan beasiswa pendidikan seni dan budaya bagi asyarakat lampung barat
15. peningkatan pengetahuan sejarah, tradisi lokal dan cagar buc a melalui jalur sekolah atau masyarakat
16. inventarisasi, dokumentasidan kajian objek pemajuan kebu yaan dan cagar budaya

Dalam melaksanakan sasaran dan indikator sasaran yang su h diuraikan pada Bab IV, ditetapkan rencana program pokok sektor pembangunan pendidikan Kabupaten Lampung Barat periode tah 2023-2026 sebagai berikut:

I. NON URUSAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Da ah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin h Daerahat Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme ntahan Daerah

II. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN D AR

A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak U Dini dan Pendidikan Non Formal

C. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

1. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan

2. Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

III. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAY NAN DASAR TERKAIT PELAYANAN DASAR

A. **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya da n Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelak ya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dala Daerah Kabupaten/Kota

B. **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dal n Daerah Kabupaten/Kota

C. **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) DaerahKabupa /Kota

D. **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR E DAYA**

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sa ran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung rat dapat dilihat pada Lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam siklus perencanaan pembangunan, keberhasilan pembangunan dapat diukur apabila ada target dan sasaran yang jelas dari suatu program dan kegiatan. Untuk menetapkan target capaian diperlukan data dan informasi yang cukup akurat sebagai dasar penetapan, yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksi target tersebut. Target dimaksud disebut dengan indikator capaian kinerja.

Indikator kinerja ini dibuat untuk menjadi alat ukur capaian kinerja dari kegiatan pokok strategis yang terdiri dari : a) Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan; b) Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah; yang diuraikan dalam tonggak-tonggak kunci keberhasilan selama empat tahun kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Sesuai dengan isu strategis, visi dan misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan tahun 2023-2026 serta program dan kegiatan priorotas dengan memperhatikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditetapkanlah indikator capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Lampung Barat yang Mengacu pada RPD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPD (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Rata-rata lama sekolah	8,07	8,08	8,09	8,10	8,11	8,11
2.	Harapan Lama Sekolah	12,26	12,27	12,28	12,29	12,3	12,3
3.	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi		13,30%	15,505	17,70%	20,00%	20,00%
4.	Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten		2,4%	6,4%	10,4%	14,4%	14,4%

BAB VIII
'ENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemer tah dan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat yang le h efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Dinas Pendidikan Kabupate Lampung Barat menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-C D) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 202 2026.

Renstra-OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lam ng Barat disusun dengan mengacu pada RPD Kabupaten Lampung Barat, ha evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, mas iah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masy akat.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra-OPD Dinas Pendidikan dan b udayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 tergantung pada sil mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemeri ahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat. Dalam aitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyar at, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam RPD abupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, agar mampu member an hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata o seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupate Lampung Barat.

LAMPIRAN

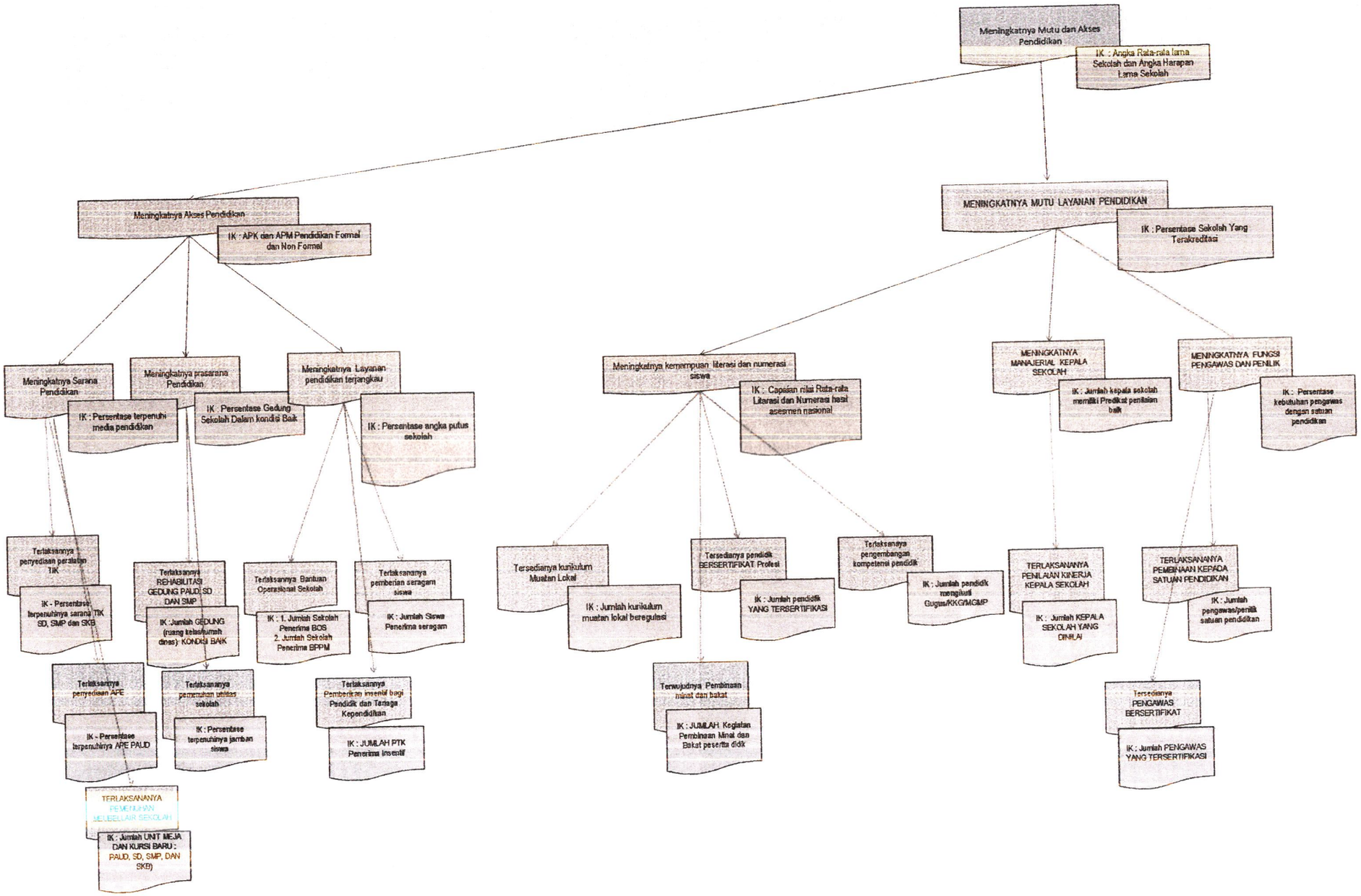
Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan
IK : Angka Rata-rata lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah
Meningkatnya Akses Pendidikan
IK : APK dan APM Pendidikan Formal dan Non Formal
MENINGKATNYA MUTU LAYANAN PENDIDIKAN
IK : Persentase Sekolah Yang Terakreditasi
Meningkatnya Sarana Pendidikan
IK : Persentase terpenuhi media pendidikan
Meningkatnya prasarana Pendidikan
IK : Persentase Gedung Sekolah Dalam kondisi Baik
Meningkatnya Layanan pendidikan terjangkau
IK : Persentase angka putus sekolah
Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa
IK : Capaian nilai Rata-rata Literasi dan Numerasi hasil asesmen nasional
MENINGKATNYA MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH
IK : Jumlah kepala sekolah memiliki Predikat penilaian baik
MENINGKATNYA FUNGSI PENGAWAS DAN PENILIK
IK : Persentase kebutuhan pengawas dengan satuan pendidikan
Terlaksannya penyediaan peralatan TIK
IK - Persentase terpenuhinya sarana TIK SD, SMP dan SKB
Terlaksannya REHABILITASI GEDUNG PAUD, SD DAN SMP
IK :Jumlah GEDUNG (ruang kelas/rumah dinas): KONDISI BAIK
Terlaksannya Bantuan Operasional Sekolah
IK : 1. Jumlah Sekolah Penerima BOS 2. Jumlah Sekolah Penerima BPPM
Terlaksannya pemberian seragam siswa
IK : Jumlah Siswa Penerima seragam
Terlaksannya penyediaan APE
IK - Persentase terpenuhinya APE PAUD
Terlaksannya pemenuhan utilitas sekolah
IK : Persentase terpenuhinya jamban siswa
Terlaksannya Pemberian insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
IK : JUMLAH PTK Penerima Insentif
TERLAKSANANYA PEMENUHAN MEUBELLAIR SEKOLAH
IK : Jumlah UNIT MEJA DAN KURSI BARU : PAUD, SD, SMP, DAN SKB)
Tersediannya kurikulum Muatan Lokal
IK : Jumlah kurikulum muatan lokal beregulasi
Tersediannya pendidik BERSERTIFIKAT Profesi
IK : Jumlah pendidik YANG TERSERTIFIKASI
Terlaksannya pengembangan kompetensi pendidik
IK : Jumlah pendidik mengikuti Gugus/KKG/MGMP
Terwujudnya Pembinaan minat dan bakat
IK : JUMLAH Kegiatan Pembinaan Minat dan Bakat peserta didik
TERLAKSANANYA PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
IK : Jumlah KEPALA SEKOLAH YANG DINILAI
TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN
IK : Jumlah pengawas/penilik satuan pendidikan
Tersediannya PENGAWAS BERSERTIFIKAT
IK : Jumlah PENGAWAS YANG TERSERTIFIKASI

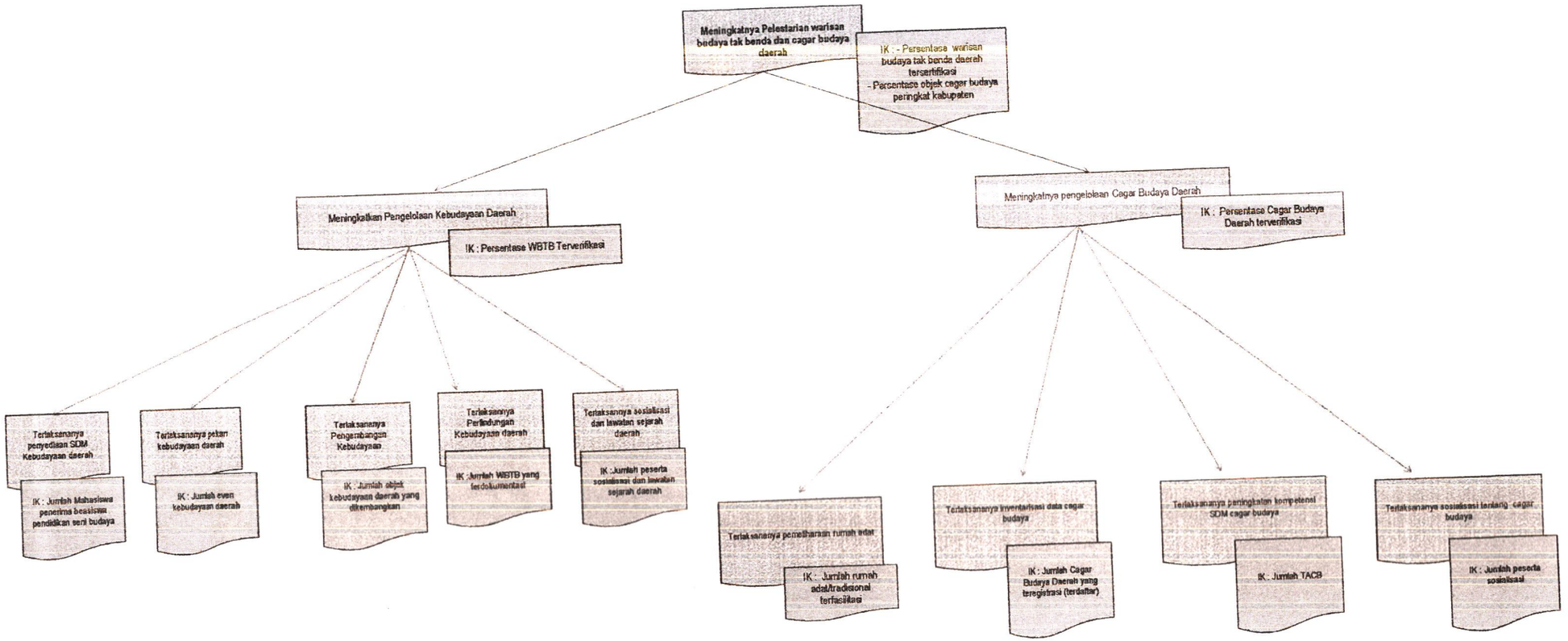
Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah
IK : - Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi
- Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten
Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan Daerah
IK : Persentase WBTB Terverifikasi
Meningkatnya pengelolaan Cagar Budaya Daerah
IK : Persentase Cagar Budaya Daerah terverifikasi
Terlaksananya penyediaan SDM Kebudayaan daerah
IK : Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa pendidikan seni budaya
Terlaksananya pekan kebudayaan daerah
IK : Jumlah even kebudayaan daerah
Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan
IK : Jumlah objek kebudayaan daerah yang dikembangkan
Terlaksananya Perlindungan Kebudayaan daerah
IK : Jumlah WBTB yang terdokumentasi
Terlaksananya sosialisasi dan lawatan sejarah daerah
IK : Jumlah peserta sosialisasi dan lawatan sejarah daerah
Terlaksananya pemeliharaan rumah adat
IK : Jumlah rumah adat/tradisional terfasilitasi
Terlaksananya inventarisasi data cagar budaya
IK : Jumlah Cagar Budaya Daerah yang teregistrasi (terdaftar)
Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM cagar budaya
IK : Jumlah TACB
Terlaksananya sosialisasi tentang cagar budaya
IK : Jumlah peserta sosialisasi

RAN II

CASCADING DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

$$HLS_j = \frac{1}{P_{j-1}} \sum_{i=1}^{n} \left(\left| Lum_i - Lum_{i-1} \right| \right)$$

$$HLS_j = FK \times \sum_{i=1}^{n} \frac{E_i}{P_i}$$

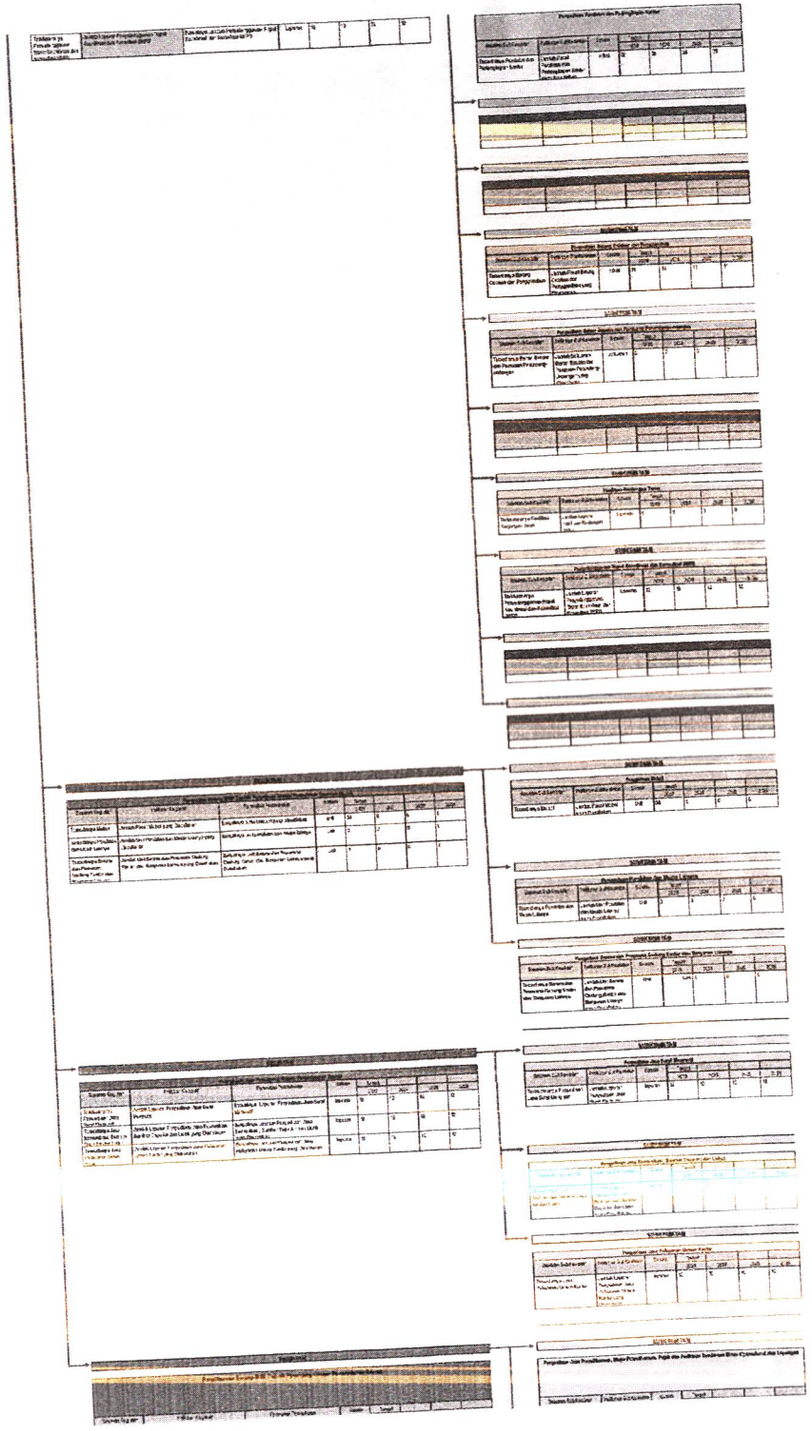

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBKOORDINATOR

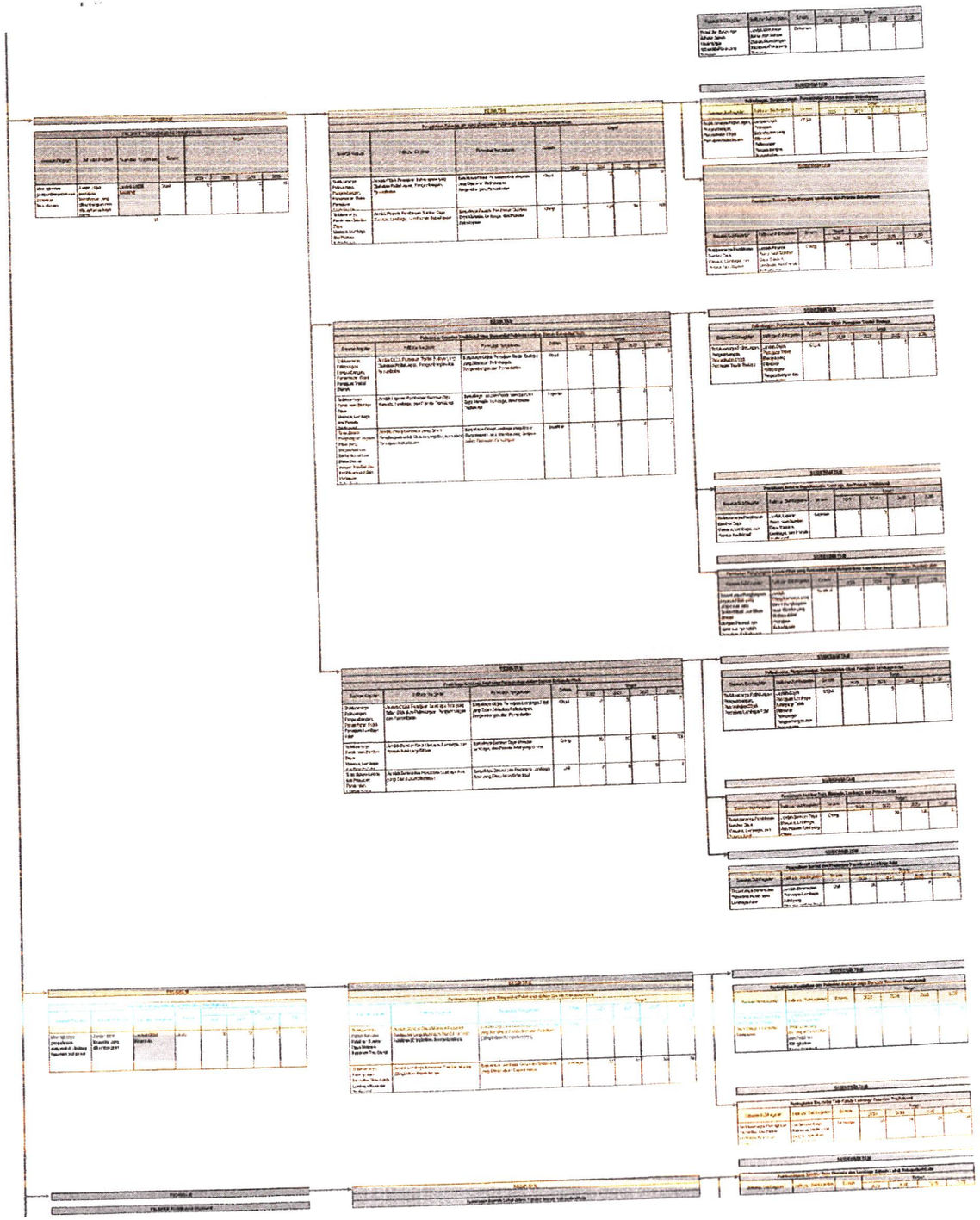

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan: Tahun-1 Target	Tahun-1 Rp	Tahun-2 Target	Tahun-2 Rp	Tahun-3 Target	Tahun-3 Rp	Tahun-4 Target	Tahun-4 Rp	Tahun-5 Target	Tahun-5 Rp	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah: Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan				Rata-rata lama sekolah Harapan Lama Sekolah	8,87 Tahun 12,26 Tahun	8,88 Tahun 12,27 Tahun		8,10 Tahun 12,28 Tahun		8,11 Tahun 12,29 Tahun		8,52 Tahun 12,30 Tahun		0 Tahun 0 Tahun		8,52 Tahun 12,30 Tahun			
	Meningkatnya Layanan Pendidikan			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD) Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)	65,15 % 98,26 %	100 % 100 %		100 % 100 %		100 % 100 %		100 % 100 %		0 % 0 %		100 % 100 %			
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	0 % 0 %	102,29 % 102,63 %	0 0	102,19 % 102,52 %	0 0	101,17 % 101,50 %	0 0	100,00 % 100,00 %	0 0	0 % 0 %	0 0	100,00 % 100,00 %	0 0		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sarana (TIK) Sekolah Dasar yang tersedia	0 Paket	40 Paket	57,715,882,000	30 Paket	53,215,248,750	28 Paket	57,715,539,218	22 Paket	53,455,468,546	0 Paket	0	120 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah prasarana sekolah Dasar yang dibangun	0 Ruang	26 Ruang	0	20 Ruang	0	19 Ruang	0	18 Ruang	0	0 Ruang	0	75 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sarana (Meubelair) Sekolah Dasar yang tersedia	0 Paket	14 Paket	0	12 Paket	0	8 Paket	0	11 Paket	0	0 Paket	0	45 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah prasarana sekolah Dasar yang direhab	0 Ruang	89 Ruang	0	56 Ruang	0	66 Ruang	0	51 Ruang	0	0 Ruang	0	262 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	5950 Paket	0	6545 Paket	0	7199 Paket	0	7918 Paket	0	0 Paket	0	27612 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	247 Satuan Pendidikan	0	247 Satuan Pendidikan	0	247 Satuan Pendidikan	0	247 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	247 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	615 Peserta Didik	0	615 Peserta Didik	0	615 Peserta Didik	0	615 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	2460 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0 Orang	711 Orang	0	711 Orang	0	711 Orang	0	711 Orang	0	0 Orang	0	711 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	1178 Orang	0	1178 Orang	0	1178 Orang	0	1178 Orang	0	0 Orang	0	1178 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 Satuan Pendidikan	247 Satuan Pendidikan	0	247 Satuan Pendidikan	0	247 Satuan Pendidikan	0	247 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	247 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	0	216 Satuan Pendidikan	0	216 Satuan Pendidikan	0	216 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	216 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Jumlah Tenaga [illegible]					0	[illegible]	0	[illegible]	0	0 Orang	0	432 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				BOS sekolah Dasar														[illegible] dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sarana (TIK sekolah menengah pertama yang tersedia	0 Paket	[illegible] Paket	36,778,613,000	6 Paket	36,571,236,600	5 Paket	34,552,832,475	0 Paket	36,471,109,048	0 Paket	0	[illegible] Paket		[illegible] dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah prasarana sekolah menengah pertama dibangun	0 Ruang	29 Ruang	0	26 Ruang	0	25 Ruang	0	18 Ruang	0	0 Ruang	0	98 Ruang		[illegible] dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sarana (Meubelair sekolah) menengah pertama yang tersedia	0 Paket	7 Paket	0	5 Paket	0	6 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible] dan Kebudayaan	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah prasarana sekolah menengah pertama direhab	0 Ruang	31 Ruang	0	31 Ruang	0	26 Ruang	0	20 Ruang	0	0 Ruang	0	108 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0 Paket	5.685 Paket	0	6.252 Paket	0	6.877 Paket	0	7.564 Paket	0	0 Paket	0	26378 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	15500 Peserta Didik	0	16800 Peserta Didik	0	18050 Peserta Didik	0	19500 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	59800 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	747 Peserta Didik	0	747 Peserta Didik	0	747 Peserta Didik	0	747 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	2988 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	383 Orang	0	385 Orang	0	387 Orang	0	389 Orang	0	0 Orang	0	1544 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	369 Orang	0	369 Orang	0	369 Orang	0	369 Orang	0	0 Orang	0	1476 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	0	84 Satuan Pendidikan	0	84 Satuan Pendidikan	0	84Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	84 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	0	66 Satuan Pendidikan	0	69 Satuan Pendidikan	0	69Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	69 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	120 Orang	0	120 Orang	0	120 Orang	0	120 Orang	0	0 Orang	0	480 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	9 Unit	8.335.232.900	12 Unit	9.058.982.900	12 Unit	9.617.274.900	14 Unit	9.712.024.900	0 Unit	0	47 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	6 Unit	0	8 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	0 Unit	0	34 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	4 Unit	0	5 Unit	0	7 Unit	0	6 Unit	0	0 Unit	0	22 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	4 Ruang	0	6 Ruang	0	4 Ruang	0	8Ruang	0	0 Ruang	0	18 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 Paket	6 Paket	0	8 Paket	0	8 Paket	0	8 Paket	0	0 Paket	0	30 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengelolaan	Jumlah perlengkapan	0 Paket	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	0	[illegible]	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0 Paket	4 Paket													
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	4.800 Peserta Didik	0	4.800 Peserta Didik	0	1.920 Peserta Didik	0	1.920 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	19200 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	390 Peserta Didik	0	390 Peserta Didik	0	390 Peserta Didik	0	390 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	1560 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 Orang	140 Orang	0	140 Orang	0	140 Orang	0	140Orang	0	0 Orang	0	560 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	384 Orang	0	384 Orang	0	384 Orang	0	384 Orang	0	0 Orang	0	1536 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pemeinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	101 Satuan Pendidikan	0	101 Satuan Pendidikan	0	101 Satuan Pendidikan	0	101 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	101 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	176 Satuan Pendidikan	0	176 Satuan Pendidikan	0	180 Satuan Pendidikan	0	180 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	712 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0 Orang	352 Orang	0	360 Orang	0	352 Orang	0	350 Orang	0	0 Orang	0	1.424 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit	1 Unit	2,874,095,000	1 Unit	2,874,095,000	1 Unit	2,874,095,000	1 Unit	2,874,095,000	0 Unit	0	4 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	2 Unit	0	3 Unit	0	3 Unit	0	3 Unit	0	0 Unit	0	11 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	2 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	3 Paket	0	3 Paket	0	3 Paket	0	3 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	0 Paket	0	8 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	0 Paket	0	8 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	1.950 Peserta Didik	0	1.950 Peserta Didik	0	1.950 Peserta Didik	0	1.950 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	7800 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	0	6 Satuan Pendidikan	0	6 Satuan Pendidikan	0	6 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	6 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan pendidikan	12 Satuan pendidikan	0	12 Satuan pendidikan	0	12 Satuan pendidikan	0	12 Satuan pendidikan	0	0 Satuan pendidikan	0	12 Satuan pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam mengelola Dana BOP pada Sekolah Non Formal/Kesetaraan	0 Orang	30 Orang	0	30 Orang	0	30 Orang	0	30 Orang	0	0 Orang	0	120 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.06	PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	sastra yang terlestarikan	0 sastra	2 sastra	775,000,000	2 sastra	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	0 Kamus	0 Kamus	0	0 Kamus	0	0 Kamus	0	1 Kamus	0	0 Kamus	0	1 Kamus	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan: Tahun-1 Target	Tahun-1 Rp	Tahun-2 Target	Tahun-2 Rp	Tahun-3 Target	Tahun-3 Rp	Tahun-4 Target	Tahun-4 Rp	Tahun-5 Target	Tahun-5 Rp	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Tervitalisasi	0 Bahasa	1 Bahasa	0	1 Bahasa	0	1 Bahasa	0	1 Bahasa	0	0 Bahasa	0	1 Bahasa	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Publikasi	1 Publikasi	0	1 Publikasi	0	2 Publikasi	0	1 Publikasi	0	0 Publikasi	0	5 Publikasi	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	3 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	3 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	0 Buku	0 Buku	0	2 Buku	0	6 Buku	0	2 Buku	0	0 Buku	0	4 Buku	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Peserta Didik	150 Peserta Didik	0	150 Peserta Didik	0	150 Peserta Didik	0	153 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	600 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM																
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	"Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya"	0 Orang	552 Orang	350,000,000	552 Orang	380,000,000	552 Orang	415,000,000	552 Orang	455,000,000	0 Orang	0	2208 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	"Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun"	0 Dokumen	1 Dokumen	59,021,000	1 Dokumen	59,021,000	1 Dokumen	59,021,000	1 Dokumen	59,021,000	1 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya daerah				**Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi** **Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten**	**10 %** **0 %**	**13,30 %** **2,4 %**		**15,50 %** **6,4 %**		**17,70 %** **10,3 %**		**21,00 %** **14,4 %**		**0 %** **0 %**		**20,00 %** **14,4 %**			
	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah			**Persentase WBTB Terverifikasi** **Persentase Cagar Budaya Daerah terverifikasi**	**12,23 %** **0 %**	**16,60 %** **35,40 %**		**22,20 %** **39,24 %**		**27,70 %** **43,58 %**		**33,30 %** **48,10 %**		**0 %** **0 %**		**33,30 %** **48,10 %**			
		[illegible]	[illegible]	Jumlah objek [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,420,000,000	15 WBTB	1,950,000,000	16 WBTB	4,300,000,000	0 WBTB	0	18 WBTB	0		
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelarunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Difasilitasi Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan	0 Objek	12 Objek	950,000,000	12 Objek	850,000,000	12 Objek	1,000,000,000	12 Objek	1,150,000,000	0 Objek	0	48 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelarunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Daya Masyarakat Pembuat dan Promotor Kebudayaan	0 Orang	45 Orang	0	150 Orang	0	150 Orang	0	[illegible]	0	0 Orang	0	[illegible]	0	Dinas Pendidikan [illegible]	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan: Tahun-1 Target	Tahun-1 Rp	Tahun-2 Target	Tahun-2 Rp	Tahun-3 Target	Tahun-3 Rp	Tahun-4 Target	Tahun-4 Rp	Tahun-5 Target	Tahun-5 Rp	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah: Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	5 Objek	1,325,000,000	5 Objek	1,450,000,000	5 Objek	1,650,000,000	5 Objek	1,725,000,000	0 Objek	0	20 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	5 Sertifikat	0	5 Sertifikat	0	5 Sertifikat	0	5 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	[illegible]	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	5 Objek	1,000,000,000	5 Objek	1,125,000,000	5 Objek	1,300,000,000	5 Objek	1,425,000,000	0 Objek	0	20 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	0 Orang	50 Orang	0	50 Orang	0	100 Orang	0	100 Orang	0	0 Orang	0	300 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit	8 Unit	0	8 Unit	0	8 Unit	0	8 Unit	0	0 Unit	0	32 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	0 Orang	50 Orang	1,575,000,000	70 Orang	1,850,000,000	75 Orang	2,050,000,000	75 Orang	2,050,000,000	0 Orang	0	75 Orang	0		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	32 Orang	1,575,000,000	42 Orang	1,850,000,000	52 Orang	2,050,000,000	62 Orang	2,250,000,000	0 Orang	0	188 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	34 Lembaga	0	34 Lembaga	0	34 Lembaga	0	34 Lembaga	0	0 Lembaga	0	34 Lembaga	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	0 Orang	60 Orang	400,000,000	75 Orang	540,000,000	75 Orang	625,000,000	75 Orang	625,000,000	0 Orang	0	75 Orang	0		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	0 Orang	100 Orang	400,000,000	125 Orang	540,000,000	150 Orang	62,500,000,000	175 Orang	62,500,000,000	0 Orang	0	550 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	0 Unit	3 Unit	0	4 Unit	0	4 Unit	0	4 Unit	0	0 Unit	0	15 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses	0 Dokumen	3 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	18 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.05	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	peringkat kabupaten yang ditetapkan, dilindungi dan dikembangkan	0 Cagar Budaya	19 Cagar Budaya	1,600,000,000	20 Cagar Budaya	1,600,000,000	21 Cagar Budaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	100 Objek	700,000,000	100 Objek	600,000,000	100 Objek	600,000,000	100 Objek	600,000,000	0 Objek	0	100 Objek	0	[illegible]	
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	0 Objek	5 Objek	0	5 Objek	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0 Objek	0	20 Objek	0	[illegible] dan Kebudayaan	
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	0 Objek	20 Objek	900,000,000	20 Objek	1,000,000,000	20 Objek	[illegible]	20 Objek	1,200,000,000	0 Objek	0				

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan: Tahun-1 Target	Tahun-1 Rp	Tahun-2 Target	Tahun-2 Rp	Tahun-3 Target	Tahun-3 Rp	Tahun-4 Target	Tahun-4 Rp	Tahun-5 Target	Tahun-5 Rp	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	0 Objek	5 Objek	0	5 Objek	0	5 Objek	0	5 Objek	0	5 Objek	0	20 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	3 Objek	0	3 Objek	0	3 Objek	0	5 Objek	0	0 Objek	0	14 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan (Non Urusan)				**Rata-rata lama sekolah**	**8,07 Tahun**	**8,08 Tahun**		**8,10 Tahun**		**8,11 Tahun**		**8,52 Tahun**		**0 Tahun**		**8,52 Tahun**			
				Harapan Lama Sekolah	**12,26 Tahun**	**12,27 Tahun**		**12,28 Tahun**		**12,29 Tahun**		**12,30 Tahun**		**0 Tahun**		**12,30 Tahun**			
	Meningkatnya Layanan Pendidikan (Non Urusan)			Angka Partisipasi **Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)**	**65,15 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		100 %		0 %		100 %			
				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)	**98,26 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**0 %**		**100 %**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0 %	80,28 %	205,279,787,960	80,29 %	215,287,699,031	80,30 %	226,059,588,610	80,31 %	237,268,895,509	0 %	0	80,31 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	11 Dokumen	335,000,000	8 Dokumen	310,000,000	11 Dokumen	335,000,000	8 Dokumen	310,000,000	0 Dokumen	0	38 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	0 Dokumen	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	16 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0 Laporan	0	48 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	1963/12 Orang/ Bulan	203,415,258,960	2062/12 Orang/ Bulan	213,586,480,881	2161/100 Orang /Bulan	224,266,539,995	2260/12 Orang/ Bulan	235,480,586,233	0 Orang/Bulan	0	2200/12 Orang/ Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	6 Laporan	0	6 Laporan	0	6 Laporan	0	6 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	20 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	29 Laporan	0	29 Laporan	0	29 Laporan	0	29 Laporan	0	0 Laporan	0	29 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Perangkat Daerah	Daerah SKPD															
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengurusan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

https://lampung.baratkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cZ51ocz/x0l6ZOjPs8pP0kmcswCRmWjx/WCSkBRRxSdmtr97tIFccaGCikLFN/SfaOsZLvnlGI0Bpkd1GPpU//J2/qZKdTw661s1lbNl/Q4f7IVZQ0BzwEvhqPMDgTTux0UI9Dsh1MfAvDuIHC6xKQb6swnSUNvcRI2nNcV6G1PAUv1MxWHR62/STI0xRnXYyAIkxyDbsZW3GDbEu

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan: Tahun-1 Target	Tahun-1 Rp	Tahun-2 Target	Tahun-2 Rp	Tahun-3 Target	Tahun-3 Rp	Tahun-4 Target	Tahun-4 Rp	Tahun-5 Target	Tahun-5 Rp	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah: Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	0 Laporan	0	10 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	24,245,000	1 Dokumen	26,669,500	1 Dokumen	29,336,450	1 Dokumen	32,270,095	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	3 Orang	0	3 Orang	0	3 Orang	0	3 Orang	0	0 Orang	0	3 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	10 paket	355,167,000	10 paket	374,882,000	10 paket	400,668,000	10 paket	423,116,100	0 paket	0	10 paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	36 paket	0	36 paket	0	36 paket	0	36 paket	0	0 paket	0	36 paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket	11 paket	0	11 paket	0	11 paket	0	11 paket	0	0 paket	0	11 paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	5 Laporan	0	5 Laporan	0	5 Laporan	0	5 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	34 Unit	343,000,000	0 Unit	47,500,000	0 Unit	47,500,000	0 Unit	47,500,000	0 Unit	0	34 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	0	3 Unit	0	3 Unit	0	3 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	0 Unit	1 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	12 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Pendidikan [illegible]	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0 Laporan	0	[illegible]	[illegible]	[illegible] Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0 Laporan	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	43 Unit	458,615,000	43 Unit	489,393,650	43 Unit	521,150,165	43 Unit	557,182,331	0 Unit	0	43 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	